

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
TRIWULAN I
PERIODE JANUARI - MARET 2026**



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KOMPLEK PERKANTORAN PEMKAB BANYUASIN JL. JAKSA
AGUNG R. SOEPRAPTO, KELURAHAN MULYA AGUNG,
KECAMATAN BANYUASIN III KABUPATEN BANYUASIN

TELP/FAX. (0711) 5723669

website : pn-pangkalanbalai.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami Tim Survey Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mampu menyelesaikan laporan Tindak Lanjut Hasil Survey triwulan I Tahun 2026. Laporan Tindak Lanjut Hasil Survey ini kami lakukan dengan maksud untuk menindaklanjuti Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada triwulan I Tahun 2026 yang diperoleh tingkat kepuasan dengan nilai Puas. Namun dari hasil tersebut, terdapat beberapa kurang maksimal terhadap pelayanan yang perlu untuk ditindak lanjuti.

Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada rekan rekan Tim Survey Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang telah bekerja keras menyelesaikan tugasnya dalam pelaksanaan survey dan menyusun Laporan Tindak Lanjut Hasil Survey triwulan I Tahun 2026, demi terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Terima kasih juga kepada seluruh Keluarga Besar Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang telah mendukung terlaksananya Tindak Lanjut keinginan pelanggan untuk mewujudkan layanan yang transparan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Semoga hubungan yang telah terjalin dengan baik selama ini dapat terjalin dengan baik seterusnya.

Kami sadar bahwa penyusunan Laporan Tindak Lanjut Hasil Survey ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mohon masukan, kritik serta saran dari seluruh aspek yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai demi kesempurnaan dari laporan ini. Semoga hasil laporan ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan seluruh unit pelayanan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Pangkalan Balai, 2 April 2026

Ketua Tim Survei,



BAINAL HAKIM, S.H.
NIP. 19690903 199403 1 005

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Triwulan I Periode Tanggal 1 Januari 2026 s.d. 31 Maret 2025

Disahkan di Pangkalan Balai
Pada hari Kamis, 2 April 2026



Panitera Muda Hukum

A.HAIRUN YULASNI, S.H., M.H.
NIP. 197007251990031001

Panitera

BAINAL HAKIM, S.H.
NIP. 196909031994031005

Mengetahui.

Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

FITRI AGUSTINA, S.H., M.H.
NIP. 197908252006042002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I KUESIONER SURVEI.....	1
BAB II METODOLOGI SURVEI.....	5
A... KRITERIA RESPONDEN.....	5
B... METODE PENCACAHAN.....	7
C... METODE PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS.....	7
BAB III PENGOLAHAN SURVEI.....	8
A... ANALISIS HASIL SURVEI.....	8
BAB IV DATA SURVEI.....	17

3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?

Pilihan jawaban:

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak Ada

Tujuan pertanyaan ini: untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).

4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?

Pilihan jawaban:

- Tidak Pernah
- Jarang
- Sering
- Selalu

Tujuan pertanyaan ini: untuk mengetahui apakah ada Petugasyang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli bisa dikamuflasekan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi" , "uang rokok" , "uang terima kasih", dsb).

5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

Pilihan jawaban:

- Tidak Pernah
- Jarang
- Sering
- Selalu

Tujuan pertanyaan ini: untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli bisa dikamuflasekan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi" , "uang rokok" , "uang terima kasih", dsb).

6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?

Pilihan jawaban:

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak ada

Tujuan pertanyaan ini: untuk mengetahui apakah ada petugas yang menerima/ meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transpor, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) di luar ketentuan.

7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? (Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBPN)

Pilihan jawaban:

- Tidak Pernah
- Jarang
- Sering
- Selalu

Tujuan pertanyaan ini: untuk mengetahui apakah ada Petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi (pungli bisa dikamouflasikan melalui berbagai istilah seperti "uang administrasi" , "uang rokok" , "uang terima kasih", dsb).

8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?

Pilihan jawaban:

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak ada

Tujuan pertanyaan ini: untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada

unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).

9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?

Pilihan jawaban:

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak ada

Tujuan pertanyaan ini: Untuk mengetahui apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater, dan sejenisnya). Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini.

10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?

Pilihan jawaban:

- Selalu
- Sering
- Jarang
- Tidak ada

Tujuan pertanyaan ini: untuk mengetahui apakah ada praktik percaloan (pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai).

BAB II METODOLOGI SURVEI

2.1 KRITERIA RESPONDEN

2.1.1 Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas I B mayoritas memiliki latar SMU sebanyak 22 Orang (56,41%) responden.

Tabel 4.

Tingkat pendidikan responden

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	2	5,13
4	SMA	22	56,41
5	D1	3	0
6	D2	0	0
7	D3	0	0
8	S1	8	20,51
9	S2	3	7,69
10	S3	0	0
JUMLAH		39	100

2.1.2 Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 19 (48,71%) responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas I B memiliki pekerjaan Lainnya.

Tabel 5.

JENIS PEKERJAAN RESPONDEN

NO	PEKERJAAN UTAMA	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	PNS	4	10,25
2	TNI	0	0
3	POLRI	1	2,56
4	SWASTA	11	28,20
5	WIRUSAHA	4	10,25
6	TENAGA KONTRAK	0	0
7	LAINNYA	19	48,71
JUMLAH		39	100